



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

# LAPORAN

## PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO

### Tahun 2024

Disusun Oleh:

**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan. Manajemen risiko merupakan uraian tentang upaya BPKAD untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Dokumen pelaksanaan penilaian risiko merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik awal dalam pengembangan SPIP dalam suatu instansi pemerintah. Dengan adanya dokumen tersebut diharapkan pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Lamongan memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas.

Lamongan, April 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**



**KHUSNUL YAQIN, S.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670524 199302 1 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. RUANG LINGKUP .....	3
II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN .....	3
A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI .....	3
B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN .....	4
III. PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN .....	4
A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN.....	4
B. HASIL IDENTIFIKASI RESIKO.....	5
C. HASIL ANALISIS RESIKO.....	8
D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN .....	13
E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN.....	14
IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI .....	18
V. RANCANGAN PEMANTAUAN .....	19
VI. PENUTUP .....	20

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas dan pengelolaan BMD yang optimal ; (2) Meningkatnya manajemen internal Perangkat Daerah .

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur keuangan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan risiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Didorong dengan adanya kesadaran tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis

- organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

### **A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang mungkin dapat terjadi sesuai dengan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Kegiatan pengendalian dilakukukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif.

Untuk dapat melihat nilai efektifitas dari pengendalian resiko yang telah direncanakan, maka dilakukan penilaian survei persepsi kepada seluruh pegawai mulai dari staf hingga pejabat eselon mengenai hasil penilaian pengendalian resiko pada unit kerja urusan keuangan.

Hasil penilaian yang telah dilakukan yakni dalam penegakan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan

struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait telah memiliki hasil penilaian yang baik dan memadai baik dari hasil review dokumen maupun hasil survei persepsi.

Sedangkan untuk hasil penilaian terkait komitmen terhadap kompetensi apabila dari hasil review dokumen telah cukup memadai namun dari hasil survei persepsi masih kurang memadai.

## **B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko pada tiap tribulan. Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan nilai hasil survei persepsi terkait komitmen terhadap kompetensi yakni dengan peningkatan kompetensi pegawai baik terkait pengelolaan dasar keuangan maupun pengelolaan resiko secara terintegrasi dan berkala. Hal ini diharapkan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan resiko yang baik di unit kerja masing-masing pegawai.

## **III. PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

### **A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN**

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memperhatikan dan mengacu pada RPJMD. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal” dengan indikator Opini BPK. Sehingga tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah “Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Agar bisa mendapatkan hasil nyata dan terukur dalam waktu

tahunan maka sasaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan adalah “Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal”.

## **B. HASIL IDENTIFIKASI RESIKO**

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian resiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi resiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko organisasi perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan proses identifikasi resiko, perlu memperhatikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa suatu resiko. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun hasil identifikasi resiko baik resiko strategis maupun resiko operasional, uraian identifikasi resiko sebagai berikut :



**Tabel III.1 Identifikasi Risiko Strategis OPD**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah	Opini BPK	Tidak bisa mempertahankan WTP	RSO.24.37.09.00	BPKAD Kab. Lamongan	Kurangnya konsistensi dan pengawasan serta penurunan kualitas dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah	Eksternal dan Internal	C	Opini atas LKPD menjadi turun	Pemerintah Kab. Lamongan
2	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal dan Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	Ketidakesesuaian antara pagu RKPD dengan KUA/PPAS/APBD	RSO.24.37.09.02	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Dinamika regulasi, politik dan kemampuan fiskal daerah	Eksternal dan Internal	C	Pelaksanaan pembangunan daerah terlambat	Pemerintah Kab. Lamongan
		Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	Penyerapan belanja daerah rendah	RSO.24.37.09.04	Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan	Realisasi pendapatan daerah tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Eksternal dan Internal	C	Pencairan belanja OPD tidak bisa maksimal di akhir tahun	Pemerintah Kab. Lamongan
		Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	Terlambatnya penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK-RI	RSO.24.37.09.05	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	Tidak tercapainya penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintah	Eksternal dan Internal	C	Penyampaian LKPD menjadi terlambat dan tidak tepat waktu sehingga berpotensi Opini atas Laporan Keuangan menurun	Pemerintah Kab. Lamongan
		Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	Pemanfaatan aset daerah yang belum optimal	RSO.24.37.09.07	Bidang Aset BPKAD Lamongan	Kurangnya penjelasan informasi terkait pemanfaatan aset serta Status kepemilikan	Eksternal dan Internal	C	Lepasnya penguasaan / kepemilikan barang milik daerah yang membuat PAD atas pemanfaatan aset daerah rendah	Pemerintah Kab. Lamongan

**Tabel III.2 Identifikasi Risiko Operasional OPD**

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	Penganggaran	Mark up anggaran belanja atas program/kegiatan tertentu dalam proses penentuan pagu anggaran	ROO.24.37.09.01	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	1. Terdapat intervensi dari pihak - pihak tertentu yang memiliki benturan kepentingan 2. Penyusunan anggaran berdasarkan hasil rapat yang dilakukan secara tidak terbuka.	Eksternal dan Internal	C	Penyusunan Perencanaan APBD Tidak ada kesesuaian dengan RKPD karena adanya intervensi	Pemerintah Kab. Lamongan
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	Pelaksanaan	Terdapat rekayasa dokumen dalam membantu proses pencairan dana	ROO.24.37.09.03	Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan	1. Kurangnya kelengkapan berkas pendukung dalam proses pencairan. 2. Keterlambatan OPD dalam melakukan proses pengajuan pencairan dana	Eksternal dan Internal	C	Kurangnya kelengkapan data SPJ dan data pendukung lainnya dalam pelaporan keuangan yang dapat menimbulkan temuan BPK	Pemerintah Kab. Lamongan
3	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMD tidak dilakukan sesuai SOP atau melewati proses pelaksanaan inventarisasi yang seharusnya dilakukan	ROO.24.37.09.05	Bidang Aset BPKAD Lamongan	1. Kurangnya Pengawasan selama proses pelaksanaan dan hasil pada kegiatan pengelolaan BMD . 2. Adanya Itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	C	Merugikan Keuangan dan Aset Negara/Daerah	Pemerintah Kab. Lamongan
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang di susun	Pelaporan	Pelaporan keuangan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi yang sesungguhnya	ROO.24.37.09.08	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	1. Tidak tersusunnya laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintah. 2. Keterlambatan OPD dalam proses penyampaian laporan keuangan	Eksternal dan Internal	C	Apabila dalam penyampaian pelaporan keuangan mengalami keterlambatan ataupun tidak sesuai dengan SAP maka dapat menimbulkan penurunan penilaian atas LKPD	Pemerintah Kab. Lamongan

C. HASIL ANALISIS RESIKO

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya. Analisis resiko dibutuhkan guna mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa resiko dan dampak yang ditimbulkan. Serta menetapkan skala dan status resiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak resiko.

Pengukuran dimensi kemungkinan kejadian resiko dan konsekuensi atau dampak risiko menggunakan 5 (lima) tingkatan, sebagai berikut:

Tabel III.3 Kriteria Kemungkinan Resiko

Kriteria Resiko	
Kriteria Kemungkinan	
Nilai Kemungkinan	Keterangan
1	Sangat Jarang
2	Jarang
3	Kadang-Kadang
4	Sering
5	Sangat Sering

Tabel III.4 Kriteria Konsekuensi / Dampak Resiko

Kriteria Resiko	
Kriteria Dampak Resiko	
Nilai Dampak	Keterangan
1	Tidak Signifikan
2	Kurang Signifikan
3	Sedang
4	Signifikan
5	Sangat Signifikan

Setelah mengetahui tingkatan skala atau level dari kemungkinan dan dampak resiko. Maka perlu juga mengetahui tingkatan resiko, tingkatan resiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Pengukuran tingkatan resiko diperlukan guna mengetahui dan menetapkan status resiko yang akan di uraikan. Perhitungan nilai tingkatan resiko sebagai berikut :



Dari tabel penilaian analisis tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun analisis resiko berdasarkan penilaian hasil dari survei responden pada masing-masing pegawai, mulai dari staf – eselon sesuai urutan kategori baik analisis resiko strategis maupun resiko operasional, sebagai berikut :

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
<b>Risiko Strategis OPD</b>							
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketidaksesuaian antara pagu RKPD dengan KUA/PPAS/APBD	RSO.24.37.09.01	10	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Dinamika regulasi, politik dan kemampuan fiskal daerah	Pelaksanaan pembangunan daerah terlambat
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyerapan belanja daerah rendah	RSO.24.37.09.02	8	Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan	Realisasi pendapatan daerah tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Pencairan belanja OPD tidak bisa maksimal di akhir tahun
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terlambatnya penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK-RI	RSO.24.37.09.03	7	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	Tidak tercapainya penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintah	Penyampaian LKPD menjadi terlambat dan tidak tepat waktu sehingga berpotensi Opini atas Laporan Keuangan menurun
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemanfaatan aset daerah yang belum optimal	RSO.24.37.09.04	9	Bidang Aset BPKAD Lamongan	Kurangnya penjelasan informasi terkait pemanfaatan aset serta Status kepemilikan	Lepasnya penguasaan / kepemilikan barang milik daerah yang membuat PAD atas pemanfaatan aset daerah rendah

**Gambar 1 Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Resiko Strategis Si Mario**

Risiko Operasional OPD							
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Mark up anggaran belanja atas program/kegiatan tertentu dalam proses penentuan pagu anggaran	ROO.24.37.09.01	10	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	1. Terdapat intervensi dari pihak - pihak tertentu yang memiliki benturan kepentingan 2.Penyusunan anggaran berdasarkan hasil rapat yang dilakukan secara tidak terbuka.	Penyusunan Perencanaan APBD Tidak ada kesesuaian dengan RKPD karena adanya intervensi
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terdapat rekayasa dokumen dalam membantu proses pencairan dana	ROO.24.37.09.02	8	Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan	1. Kurangnya kelengkapan berkas pendukung dalam proses pencairan. 2.Keterlambatan OPD dalam melakukan proses pengajuan pencairan dana	Kurangnya kelengkapan data SPJ dan data pendukung lainnya dalam pelaporan keuangan yang dapat menimbulkan temuan BPK
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMD tidak dilakukan sesuai SOP atau melewati proses pelaksanaan inventarisasi yang seharusnya dilakukan	ROO.24.37.09.03	7	Bidang Aset BPKAD Lamongan	1. Kurangnya Pengawasan selama proses pelaksanaan dan hasil pada kegiatan pengelolaan BMD . 2. Adanya Itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan pribadi	Merugikan Keuangan dan Aset Negara/Daerah
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaporan keuangan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi yang sesungguhnya	ROO.24.37.09.04	8	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	1. Tidak tersusunnya laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintah. 2. Keterlambatan OPD dalam proses penyampaian laporan keuangan	Apabila dalam penyampaian pelaporan keuangan mengalami keterlambatan ataupun tidak sesuai dengan SAP maka dapat menimbulkan penurunan penilaian atas LKPD

**Gambar 2 Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Resiko Operasional Si Mario**

Dari kedua gambar hasil analisis resiko yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa terkait hasil analisis resiko strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Resiko Ketidaksesuaian antara pagu RKPD dengan KUA/PPAS/APBD memiliki nilai skala resiko sebesar 10 dengan warna oranye, yang artinya memiliki kemungkinan sangat sering terjadi namun dampak yang dihasilkan kurang signifikan akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
2. Resiko Penyerapan belanja daerah rendah memiliki nilai skala resiko sebesar 8 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi namun dampak yang dihasilkan akan signifikan sehingga resiko yang dimiliki tergolong sedang.
3. Resiko Terlambatnya penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK-RI memiliki nilai skala resiko sebesar 7 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi namun dampak yang dihasilkan akan signifikan sehingga resiko yang dimiliki tergolong sedang.
4. Resiko Pemanfaatan aset daerah yang belum optimal memiliki nilai skala resiko sebesar 9 dengan warna oranye, yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi dan dampak yang dihasilkan cukup signifikan atau sedang sehingga resiko yang dimiliki tergolong tinggi.

Dan terkait gambar hasil analisis resiko operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Resiko Mark up anggaran belanja atas program/kegiatan tertentu dalam proses penentuan pagu anggaran memiliki nilai skala resiko sebesar 10 dengan warna oranye, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi namun dampak yang dihasilkan sangat signifikan sehingga resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
2. Resiko Terdapat rekayasa dokumen dalam membantu proses pencairan dana memiliki nilai skala resiko sebesar 8 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan sering terjadi namun dampak yang dihasilkan kurang signifikan sehingga resiko yang dimiliki tergolong sedang.
3. Resiko Pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMD tidak dilakukan



sesuai SOP atau melewati proses pelaksanaan inventarisasi yang seharusnya dilakukan memiliki nilai skala resiko sebesar 7 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi namun dampak yang dihasilkan cukup signifikan atau sedang sehingga resiko yang dimiliki tergolong sedang.

4. Resiko Pelaporan keuangan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi yang sesungguhnya memiliki nilai skala resiko sebesar 8 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi dan dampak yang dihasilkan signifikan sehingga resiko yang dimiliki tergolong sedang.

#### **D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lamongan untuk mengatasi risiko strategis sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian antara pagu RKPD dengan KUA/PPAS/APBD dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Koordinasi dan pembahasan dengan OPD dan Tim Anggaran bersama DPRD terkait pagu program kegiatan prioritas yang telah ditetapkan.
2. Penyerapan belanja daerah rendah dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Koordinasi penginputan anggaran kas dan pencairan disesuaikan dengan jadwal program kegiatan.
3. Terlambatnya penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK-RI dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Pendampingan dan Monitoring dalam penyusunan laporan keuangan OPD.
4. Pemanfaatan aset daerah yang belum optimal dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Pendampingan dan Monitoring Laporan aset secara berkala kepada masing-masing OPD terkait inventarisasi BMD.

Selain itu kegiatan yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lamongan untuk mengatasi risiko operasional sebagai berikut :

1. Mark up anggaran belanja atas program/kegiatan tertentu dalam



proses penentuan pagu anggaran dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Sebelum dilakukan penetapan APBD telah melalui berbagai proses seperti penyampaian dan pembahasan bersama dengan Bupati dan DPRD mengenai rancangan APBD, yang kemudian dilakukan evaluasi oleh Gubernur.

2. Terdapat rekayasa dokumen dalam membantu proses pencairan dana dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Pelayanan pengajuan pencairan dilakukan melalui aplikasi SIPPLA (Sistem Informasi Paperless Perbendaharaan Kabupaten Lamongan) sehingga diperlukan kelengkapan dokumen agar dapat melakukan proses pengajuan pencairan.
3. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMD tidak dilakukan sesuai SOP atau melewati proses pelaksanaan inventarisasi yang seharusnya dilakukan dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Dilakukan kegiatan rekon aset secara berkala kepada setiap OPD sesuai SOP yang telah ditetapkan untuk mengurangi adanya selisih dalam penginventarisasian BMD.
4. Pelaporan keuangan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi yang sesungguhnya dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Pelayanan pendampingan dalam pelaporan keuangan telah dapat dilakukan melalui Aplikasi Sakti untuk mengurangi resiko adanya selisih dalam laporan realisasi.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

## **E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN**

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu tindakan preventif dan mitigasi. Pengendalian yang bersifat preventif merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigasi merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Dalam setiap tindakan pengendalian yang telah dilakukan oleh

masing-masing unit kerja akan masih ada celah pengendalian yang dapat memberikan dampak buruk bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Sehingga perlu di bangun tindakan pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing resiko baik resiko stratgeis maupun operasional sebagai berikut :

**Tabel III.7 Rencana Tindak Pengendalian (RTP)**

Uraian Resiko	Pengendalian Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
<b>Resiko Strategis</b>			
Ketidaksesuaian antara pagu RKPD dengan KUA/PPAS/APBD	Koordinasi dan pembahasan dengan OPD dan Tim Anggaran bersama DPRD terkait pagu program kegiatan prioritas yang telah ditetapkan	adanya intervensi dan terdapat OPD yang mengajukan penambahan pagu atau sub kegiatan baru dari program kegiatan prioritas yang telah ditetapkan	Melakukan Rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait untuk dilakukan penyesuaian kebijakan pada saat penyusunan program dan anggaran kegiatan
Penyerapan belanja daerah rendah	Koordinasi penginputan anggaran kas dan pencairan disesuaikan dengan jadwal program kegiatan.	Terdapat OPD yang mengajukan pencairan tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah di input	Optimalisasi pemanfaatan dana transfer dari pusat sesuai dengan kebutuhan anggaran program kegiatan prioritas
Terlambatnya penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK-RI	Pendampingan dan Monitoring dalam penyusunan laporan keuangan OPD	Adanya perubahan data dalam laporan keuangan yang telah disusun	Melakukan koordinasi yang intensif serta saling bersinergi dengan pihak-pihak terkait agar penyampaian laporan keuangan

Uraian Resiko	Pengendalian Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
			bisa tepat waktu
Pemanfaatan aset daerah yang belum optimal	Pendampingan dan Monitoring Laporan aset secara berkala kepada masing-masing OPD terkait inventarisasi BMD	Masih terdapat beberapa OPD yang tidak mengupdate data terkait inventarisasi barang di masing-masing OPD	Melengkapi dokumen bukti kepemilikan aset seperti patok dan label sebagai upaya pengamanan aset serta melakukan pengawasan terhadap aset yang telah dimiliki agar dapat dilakukan pemanfaatan aset kepada pihak lain guna peningkatan PAD
<b>Resiko Operasional</b>			
Mark up anggaran belanja atas program/kegiatan tertentu dalam proses penentuan pagu anggaran	Sebelum dilakukan penetapan APBD telah melalui berbagai proses seperti penyampaian dan pembahasan bersama dengan Bupati dan DPRD mengenai rancangan APBD, yang kemudian dilakukan evaluasi oleh Gubernur	-	Efektivitas pelaksanaan Verifikasi dan evaluasi dokumen perencanaan keuangan secara berjenjang

<b>Uraian Resiko</b>	<b>Pengendalian Sudah Ada</b>	<b>Celah Pengendalian</b>	<b>Rencana Tindak Pengendalian</b>
Terdapat rekayasa dokumen dalam membantu proses pencairan dana	Pelayanan pengajuan pencairan di lakukan melalui aplikasi SIPPLA (Sistem Informasi Paperless Perbendaharaan Kabupaten Lamongan) sehingga diperlukan kelengkapan dokumen agar dapat melakukan proses pengajuan pencairan	-	Pengoptimalan aplikasi yang digunakan dalam proses pengajuan pencairan dana untuk mengurangi adanya rekayasa dokumen kelengkapan pengajuan serta adanya verifikator guna memeriksa kembali dokumen yang telah di ajukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan dokumen yang diminta
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMD tidak dilakukan sesuai SOP atau melewati proses pelaksanaan inventarisasi yang seharusnya dilakukan	Dilakukan kegiatan rekon aset secara berkala kepada setiap OPD sesuai SOP yang telah ditetapkan untuk mengurangi adanya selisih dalam penginventarisasi an BMD	-	1. Pengoptimalan laporan aset. 2.Pemanfaatan aplikasi untuk memantau pergerakan inventarisasi aset tiap-tiap OPD. 3. Melakukan rekon bulanan, tribulanan, dan semesteran
Pelaporan keuangan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi yang	Pelayanan pendampingan dalam pelaporan keuangan telah dapat di lakukan	-	Mengoptimalkan pelayanan pendampingan dalam pelapora n keuangan kepada

Uraian Resiko	Pengendalian Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
sesungguhnya	melalui Aplikasi Sakti untuk mengurangi resiko adanya selisih dalam laporan realisasi		tiap-tiap OPD serta adanya rekon bulanan, tribulanan dan semesteran

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Guna mendukung berjalanya lingkungan pengendalian yang dibangun, maka diperlukan media untuk menyampaikan masing-masing unsur lingkungan pengendalian. Media penyampaian informasi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lamonan sebagai berikut :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi
Risiko Strategis OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:				
1	Melakukan Rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait untuk dilakukan penyesuaian kebijakan pada saat penyusunan program dan anggaran kegiatan	Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan
2	Optimalisasi pemanfaatan dana transfer dari pusat sesuai dengan kebutuhan anggaran program kegiatan prioritas	Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait	Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Lamongan	Bendahara di masing-masing OPD
3	Melakukan koordinasi yang intensif serta saling bersinergi dengan pihak-pihak terkait agar penyampaian laporan keuangan bisa tepat waktu	Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	Admin Penyusun Laporan Keuangan di masing-masing OPD
4	Melengkapi dokumen bukti kepemilikan aset seperti patok dan label sebagai upaya pengamanan aset serta melakukan pengawasan terhadap aset yang telah dimiliki agar dapat dilakukan pemanfaatan aset kepada pihak lain guna peningkatan PAD	Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait	Bidang Aset BPKAD Kab. Lamongan	Admin Pengurus Barang di masing-masing OPD

Gambar 3 Lampiran Form 8 Infokom Resiko Strategis Si Mario

Risiko Operasional OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:			
1 Efektivitas pelaksanaan Verifikasi dan evaluasi dokumen perencanaan keuangan secara berjenjang	Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan
2 Pengoptimalan aplikasi yang digunakan dalam proses pengajuan pencairan dana untuk mengurangi adanya rekayasa dokumen kelengkapan pengajuan serta adanya verifikator guna memeriksa kembali dokumen yang telah di ajukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan dokumen yang diminta	Sosialisasi dan koordinasi kepada kepada OPD Terkait	Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Lamongan	Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan
3 1. Pengoptimalan laporan aset. 2.Pemanfaatan aplikasi untuk memantau pergerakan inventarisasi aset tiap-tiap OPD. 3. Melakukan rekon bulanan, tribulanan, dan semesteran	Sosialisasi dan Rekonsiliasi kepada kepada OPD Terkait	Bidang Aset BPKAD Kab. Lamongan	Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan
4 Mengoptimalkan pelayanan pendampingan dalam pelapora n keuangan kepada tiap-tiap OPD serta adanya rekon bulanan, tribulanan dan semesteran	Sosialisasi dan Rekonsiliasi kepada kepada OPD Terkait	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan

**Gambar 4 Lampiran Form 8 Infokom Resiko Operasional Si Mario**

Dalam rangka pelaksanaan manajemen resiko informasi dan komunikasi penting untuk dilakukan agar dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen pengendalian yang telah di susun secara efektif. Terutama dalam hal terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang di inginkan.

### V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang diterapkan, telah berjalan secara efektif mengatasi resiko dan apakah langkah-langkah perbaikan telah dilaksanakan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi pemantuan penyusunan Perda dan Perbup, Penyaluran dan pencairan dana, Pelaksaan APBD, pengamanan asset serta pelaksanaan RTP.

Bentuk atau metode pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lamongan adalah dengan senantiasa melakukan pendampingan secara langsung dengan melakukan rekonsiliasi tiap bulan, tribulanan bahkan semesteran. Serta melakukan monitoring dengan menggunakan aplikasi Keuangan Daerah baik aplikasi internal seperti SAKTI, SIPPLA, e-asset, maupun aplikasi nasional seperti SIPD.

## VI. PENUTUP

Pelaporan manajemen risiko ini dilakukan sebagai wujud proses atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Dokumen ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap unit kerja dan seluruh pegawai serta ditunjang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga dapat menekan risiko yang mungkin terjadi secara bertahap dan berkelanjutan.

Serta menganalisis kembali apakah tindakan pengendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya.

Lamongan, April 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN



**KHUSNUL YAQIN, S.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670524 199302 1 004